Andalkan Impor, Negara dan Rakyat Tanpa Kedaulatan Pangan
Erabaru.net
July 26, 2012
By Era Baru News

Jakarta – Perhimpunan Rakyat Pekerja menilai saat ini Indonesia sudah memasuki krisis pangin akibat kebijakan rezim Neoliberal. Pemerintah yang hanya mengandalkan impor juga telah menciptakan negara dan rakyat Indonesia sudah tidak memiliki kedaulatan pangan.

Pernyataan tersebut disampaikan bertepatan aksi mogok produksi perajin tahu-tempe akibat melonjak harga kedelai. Mogok para perajin tahu dan tempe mengakibatkan langkanya peredaran tempe dan tahun di pasaran.

"Naiknya harga kedelai tersebut diakibatkan musim kering di Amerika Serikat, yang merupakan produsen utama dunia untuk kedelai. Ketergantungan terhadap kedelai impor dari AS tersebut dikarenakan untuk menutupi kebutuhan kedelai secara nasional sebesar 2,4 juta ton/tahun," kata Ketua Nasional PRP, Anwar Ma'ruf, dalam siaran persnya di Jakarta (26/7/2012).

Menurutnya, produk nasional di Indonesia hanya mampu memenuhi 600.000 ton per tahun. Sementara kekurangannya, Indonesia harus mengimpor kedelai sebesar 1,8 juta ton/tahun dari Amerika Serikat.

"Kebijakan impor pangan ini bukan hanya terjadi di kedelai saja. Ketergantungan terhadap kebutuhan pangan yang diimpor dari luar negeri, ternyata sudah sangat lama diterapkan oleh rezim neoliberal di Indonesia," jelasnya.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), selama bulan Januari-Juni 2011, impor pangan Indonesia mencapai 11,33 juta ton dengan nilai US$ 5,36 miliar atau kurang lebih Rp 45 triliun. Barang impor mulai dari beras, jagung, terigu, gula garam, telur, ayam, daging sapi, singkong, bawang merah, cabai hingga buah-buahan.

Adapun data impor pangan selama Januari-Maret 2012 dari Pelindo II cabang Tanjung Priok menunjukkan impor beras sebanyak 330.539 ton, jagung 33.700 ton, tapioka 7.422 ton, gandum 546.932 ton dan garam 25.400 ton.

"Sangat ironis memang mengingat Indonesia yang selalu disebut sebagai negara agraris, pada kenyataannya untuk memenuhi kebutuhan pangan nasionalnya harus bergantung pada negara-negara lain," tegasnya.

Dijelaskannya, impor pangan terus meningkat sejak Indonesia menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan menerapkan liberalisasi ekonomi atau perdagangan bebas melalui *Agreement on Agriculture* (AoA).

Tidak sampai di sana, Indonesia semakin terbuka setelah Soeharto menandatangani Letter of Intent dengan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Structural Adjustment Program (SAP) dengan Bank Dunia pada tahun 1997.

Apalagi kemudian dilakukannya Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA), baik secara regional maupun bilateral, yang akhirnya menghancurkan produk pangan di Indonesia, terlebih lagi kehidupan para petaninya.

"Sebagai contoh, Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) yang diberlakukan awal tahun 2010 telah menyebabkan serbuan kentang impor dari Cina di sentra produksi

kentang di Jawa Barat dan Jawa Tengah mulai September 2011," paparnya.

Akibat sikap pemerintah yang menandatangani ACFTA, ribuan keluarga petani mengalami kerugian ratusan juta rupiah karena merosotnya harga kentang para petani oleh serbuan kentang impor.

Anwar mengatakan bahwa negara dan rakyat Indonesia sudah tidak memiliki kedaulatan pangan, karena kekuatan dalam mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi di sektor pangan telah diserahkan ke mekanisme pasar yang dikuasai oleh para pemilik modal raksasa.

"Sebut saja seperti Badan Urusan Logistik (BULOG) yang telah dijadikan privat dan industri hilir pangan hingga distribusinya (ekspor-impor) dikuasai oleh perusahaan seperti Cargill dan Charoen Phokpand. Rakyat Indonesia hanya dijadikan sebagai para pekerja di sektor pangan atau sekedar konsumen saja," ungkapnya. (mas/asr)

Copyright © 2003-2011 Era Baru News
Source: http://erabaru.net/nasional/50-politik/31161-andalkan-impor-negara-dan-rakyat-tanpa-kedaulatan-pangan